**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI
BIDANG KEHUTANAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS/2018/PN WNS
DAN PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/LH/2020/PN.BLS)**

Oleh: Fitria

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing 1: Dr. Evi Deliana, HZ.,S.H.,LL.M

Pembimbing 2: Dr. Davit Rahmadan, S.H.,M.H

**Alamat: Jalan Mahoni Gang Mahoni III No.4, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit
Raya, Pekanbaru**

Email/Telepon: fifitria99@gmail.com / 082388005228

ABSTRACT

In criminal case decisions, it is known that there is a gap in sentencing which is better known as disparity. The disparity in sentencing has a deep impact, because it contains a constitutional balance between individual freedom and the state's right to convict. This can be seen in the judge's decision in the forestry crime Number 10/Pid.Sus/2018/PN Wns and Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls One decision with another decision which has the characteristics of a criminal offense are the same and there are similarities in the articles charged but have different decisions. The purpose of writing this thesis: First, to answer and solve the problem of disparity in decisions on forest destruction crimes in Decision Number 10/Pid.Sus/2018/PN Wns and Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls .Second , to find factors that cause disparities in criminal decisions on forest destruction in decisions Number 10/Pid.Sus/2018/PN Wns and Decisions Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls. The author conducts research using normative juridical methods or literature studies in order to obtain secondary data through documentary studies, namely by studying and analyzing in a comparative deductive way the laws and regulations with theories that have a relationship to the problems studied.

From the results of this study, there are two main problems: First, what is the analysis of the disparity in the decision on forest destruction in the decision Number 10/Pid.Sus/2018/PN Wns and Decision Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls, Second, What are the factors causing the disparity of forest destruction criminal decisions in decisions Number 10/Pid.Sus/2018/PN Wns and Decisions Number 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls.

The author's suggestion in this study is the importance of understanding the nature of the law itself. As in the case that has been studied, one of the reasons for the difference is due to a difference in paradigm in viewing the nature of the law itself so that the desired justice is not achieved. Law Number 18 of 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction should not be interpreted partially, which has implications for the vulnerability of people living around forest areas to being snared by this Law. The paradigm adopted and the method of interpretation applied will affect the quality of the judge's decision. For this reason, judges need to consider all aspects in making a decision.

Keywords : Disparity-Crime-Forestry

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya.² Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara.³

Dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.

Dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan ditemukan perbedaan putusan hakim

pada kasus serupa yang dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Watansop-peng Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns dengan terdakwa Sukardi bin Massalese dan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls dengan terdakwa Bongku bin (Alm) Jelodan, yang melakukan penebangan pohon dan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan. Kedua terdakwa pada kasus tersebut didakwa dengan pasal yang sama, diantaranya Pasal 82 Ayat (1) huruf b, Pasal 82 Ayat (1) huruf c, dan Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Pemberian dan penerapan Pasal yang dilakukan pada dua kasus yang berbeda di atas terjadi disparitas putusan hakim. Putusan yang satu dengan putusan yang lain yang memiliki karakteristik pelanggaran pidana yang sama dan adanya kesamaan pasal yang didakwakan tetapi memiliki putusan yang berbeda. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang berjudul “**Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Kehutanan**

(Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls?
2. Apakah faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk menjawab dan memecahkan masalah disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 10 /Pid.Sus/ 2018/ PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls.
2. Untuk menemukan faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 10 / Pid.Sus/2018/PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls.

2) Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana berkaitan dengan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, KENCANA, Jakarta : 2015, hlm. 1.

³ Yasmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 218.

⁴ Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm. 216.

disparitas putusan hakim dalam perkara pidana di bidang kehutanan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
3. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

D. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.⁵ Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logik.⁶

Menurut Prof. J.H.A. Logemann : “Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang ahli hukum diwajibkan untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu.”

Dalam usaha mencari dan menentukan kehendak pembuat undang-undang itulah maka dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa metode atau cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan seorang ahli hukum yaitu :⁷

- a) Penafsiran Gramatikal (*taatkundige interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan atau kata-kata, tata kalimat di dalam suatu konteks bahasa yang digunakan pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.
- b) Penafsiran Sejarah (*historische interpretatie*), yaitu penafsiran yang

dilakukan terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan dengan meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan undang-undang yang bersangkutan.

- c) Penafsiran Sistematis (*systematische interpretatie*), yaitu penafsiran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan, dengan cara menyelidiki suatu sistem tertentu yang terdapat di dalam suatu tata hukum, dalam rangka penemuan asas-asas hukum umum yang dapat diterapkan dalam suatu masalah hukum tertentu.
- d) Penafsiran Sosiologis (*teleologis*), sejalan dengan pandangan Prof. L.J. van Apeldoorn, maka salah satu tugas utama seorang ahli hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal konkrit yang ada di dalam masyarakat.
- e) Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran terhadap kata, istilah atau pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang sendiri.

2. Teori Keadilan

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Terdapat dua tujuan dari keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu sebagai berikut.

- a) Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
- b) Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls

⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, KENCANA, Depok, 2018, hlm. 247.

⁶ Isharyanto dan Aryoko Abdurrahchman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 17.

⁷ Jonaedi Efendi, *Op.cit.*, hlm. 247-248.

memaksudkannya “rata-rata”(average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabaikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang teorinya membuat pandangannya lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis dalam keadilan sosial.⁸

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru mengenai konsep dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini dirasa perlu untuk dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan di antaranya sebagai berikut :

1. Disparitas adalah berbeda.⁹
2. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis.¹⁰
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak

pidana atau bukan adalah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan melihat asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam putusan hakim. Peneliti menganalisis adanya disparitas dalam perkara pidana di bidang kehutanan dengan membandingkan putusan hakim Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library search*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas:¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹⁴ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, 2018, hlm. 100- 101.

⁹ Irfan Ardiansyah, *Op.Cit*, hlm. 144.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 145

¹¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, KENCANA, Jakarta, 2017, hlm. 333.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 100.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 132

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 47.

- g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns.
- h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/ atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹⁷

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal search*), digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁸ Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam

mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Tindak Pidana Kehutanan

1. Definisi Disparitas

Pengertian disparitas (*disparity*) secara etimologi yaitu berbeda. Sedangkan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) menurut terminologi adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim.¹⁹

1. Tindak-tindak pidana yang sama
2. Tindak-tindak pidana yang sifat berbahanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah
3. Tindak pidana yang sama yang pelakunya lebih dari seseorang.

Disparitas pemidanaan didefinisikan sebagai sebuah bentuk perlakuan yang tidak setara yang sering penyebabnya tidak dapat dijelaskan dan konsekuensinya paling tidak adalah jikalau tidak adil dan tidak membawa manfaat berarti, aneh/tidak layak.²⁰ Menurut Barda Nawawi, disparitas putusan hakim yang dimaksud adalah disparitas yang tidak didasarkan kepada landasan yang beralasan (*reasonable*) berupa filosofi atau tujuan yang sama, kriteria dan ukuran yang sama.²¹ Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.²²

2. Disparitas Tindak Pidana Kehutanan

- a) Disparitas putusan pemidanaan dalam pidana pokok

Rentang hukuman dalam pemidanaan perkara tindak pidana kehutanan memberikan gambaran bahwa disparitas putusan memang masih

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 119.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 109

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, 2018, Hlm. 160.

¹⁹ Irfan Ardiansyah, *Op.Cit*, hlm. 51

²⁰ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 2012, hlm. 181

²¹ Wahyu Nugroho, "Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012, hlm. 278

²² Amrun, "Faktor-Faktor Penyebab Timbunya Disparitas Pemidanaan", *Jurnal MENARA Ilmu*, Volume XII Jilid II No.79 Januari 2018

terjadi, karena Indonesia mengenal sistem minimum dan maksimum dalam penerapan pidananya.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sanksi pidana bagi perseorangan diatur dalam pasal 82 ayat (1) dan (2), pasal 83 ayat (1) s/d ayat (3), pasal 84 ayat (1) s/d ayat (3), pasal 85 ayat (1), pasal 86 ayat (1), pasal 87 ayat (1) s/d ayat (3), pasal 88 ayat (1), pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1), pasal 91 ayat (1), pasal 92 ayat (1), pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), pasal 94 ayat (1), pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), pasal 96 ayat (1), pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), pasal 100 ayat (1), pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), pasal 102 ayat (1), dan yang terakhir pada pasal 103 ayat (1).²³

- b) Disparitas pemidanaan dalam pidana tambahan

Ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan semua hasil hutan yang merupakan hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran dirampas untuk negara. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang menegaskan semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirampas untuk negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, perampasan dilakukan terhadap semua barang tanpa menggolongkan barang tersebut milik pelaku tindak pidana atau milik pihak ketiga. Alat angkut milik pihak ketiga yang tidak berhubungan sebab akibat dengan tindak pidana

(causaal verband) tetap dirampas untuk negara. Pihak ketiga yang tidak berhubungan sebab akibat dengan tindak pidana (causaal verband) adalah pihak yang tidak tahu barang miliknya digunakan untuk menjalankan tindak pidana, misalnya truk yang digunakan disewa atau dipinjam oleh terdakwa dari pihak ketiga.²⁴

3. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Kehutanan

Penyebab terjadinya disparitas pemidanaan khususnya disparitas pemidanaan terhadap *illegal logging* (pembalakan liar) dalam putusan pengadilan di Indonesia bersumber dari hukum itu sendiri, bukan bersumber dari hakim atau faktor-faktor lain, jelasnya adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Tidak ada pedoman pemberian pidana yang umum.
- 2) Hakim memiliki kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan (di samping dimilikinya kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana/*Starfsoort* yang dikehendaki).

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. *Verdict* dalam ensiklopedia internasional semakna dengan *civil procedure*, *Criminal Procedure*. Dalam *common law system*, putusan-putusan pengadilan disebut dengan *case law*.²⁶

2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

- a) Putusan pemidanaan (*verordeling*)

Pada dasarnya, putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

- b) Putusan bebas (*Vrijspraaklacquittal*)

²³ Yasir Said dan Ifrani, *Pidana Kehutanan Indonesia Pergeseran Delliik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusamedia, Bandung, 2022. Hlm. 107.

²⁴ Cut Anggiya Fitri, “Disparitas Putusan Pidana Tambahan Terhadap Perampasan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Kehutanan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2 (4) November 2018

²⁵ Zarof Ricar, *Op.Cit.*, hlm. 243.

²⁶ Joenadi Efendi, *Op.Cit.* hlm. 79

Jika kita bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

- c) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Ketentuan terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

- d) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP.

- e) Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah : Pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum (misalnya Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar memiliki wilayah hukum sendiri-sendiri).

- f) Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur: misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut

sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

3. Formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim

Dalam pasal 197 ayat 1 KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, di mana putusan pemidanaan harus memenuhi atau memuat hal-hal sebagai berikut :²⁷

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASAR-KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan diperiksa di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam tuntutan;
- f. Pasal, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara di periksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat adalah palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

²⁷ Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2018, Hlm. 110

C. Tentang Perbuatan Perusakan Hutan

1. Definisi Perusakan hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

2. Jenis Perusakan Hutan

- a) Pembalakan liar
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
- b) Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.
- c) Terorganisasi
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

D. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

1. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- 1) Asas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 :
 - a. Keadilan dan kepastian hukum
 - b. Keberlanjutan
 - c. Tanggung jawab negara
 - d. Partisipasi masyarakat
 - e. Tanggung Gugat
 - f. Prioritas
 - g. Keterpaduan dan Koordinasi
- 2) Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 :
 - a) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
 - b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
 - c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
 - d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan perusakan hutan.
- 3) Ruang Lingkup Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun, ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi :
 - a. Pencegahan perusakan hutan;
 - b. Pemberantasan perusakan hutan;
 - c. Kelembagaan;
 - d. Peran serta masyarakat;
 - e. Kerja sama internasional
 - f. Perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
 - g. Pembiayaan
 - h. Sanksi

2. Pencegahan Perusakan Hutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang digunakan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.

3. Pemberantasan Perusakan Hutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/ 2018/PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls

1. Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/ PN Wns

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns adalah Pasal 12 Huruf b Jo Pasal 82 ayat 1 Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan salah satu dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan "*Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)*".

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung dan melakukan cocok tanam berupa cengkeh, kopi, Lombok, tomat, lengkuas, sere dengan menggunakan alat berupa Subbe dengan cara menggali lubang kemudian bibit jahe berupa umbi dimasukkan ke dalam lubang tersebut lalu ditutup kembali. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai mata

pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perbuatan ini dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangannya.

Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan dengan menggunakan beberapa Pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan :
 - a) Pasal 1 angka 21 : "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara **terorganisasi** di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia"
 - b) Pasal 1 angka 4 : "Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang **terorganisasi**."
 - c) Pasal 1 angka 5 : "Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan **terorganisasi** yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri
2. Pertimbangan dengan menggunakan pendapat ahli. Pendapat ahli yang digunakan ialah pendapat Dr.Ahmad Sofian, S.H.,M.A., yang merupakan ahli Hukum Pidana, bahwa Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dilihat secara filosofis atau prinsip dasar UU P3H secara utuh dengan mempertimbangkan Pasal 1 angka 6 yang mengandung imunitas bagi kelompok masyarakat yang terdapat di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, dan bahwa UU P3H dibuat untuk memberantas kejahatan korporasi atau kejahatan yang terorganisasi.
3. Pertimbangan dari keterangan-keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak melibatkan orang lain secara terstruktur melainkan dilakukan secara tradisional dan bukan untuk tujuan komersial.

2. Analisis Perkara Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.BIs

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns adalah Pasal 12 Huruf b Jo Pasal 82 ayat 1 Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan salah satu dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Tanam Industri dengan tujuan melakukan perladangan menanam ubi kayu. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perbuatan ini dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangannya. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan dengan menggunakan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena Terdakwa adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar areal konsensi Hutan Tanam Industri PT.ARARA ABADI, maka

Terdakwa memenuhi unsur sebagai subyek hukum dari tindak pidana ini.

2. Pertimbangan dari keterangan-keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon di kawasan Hutan Tanam Industri tanpa izin pemanfaatan hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menurut Barda Nawawi, indikator disparitas dapat dilihat dari beberapa kategori, diantaranya :

1. Pelaku tindak pidana
2. Objek tindak Pidana Yang dilakukan
3. Sifat tindak pidana (apakah tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana berat atau ringan)
4. Pribadi pelaku/terdakwa (recidivis atau tidak)
5. Keadaan pelaku ketika melakukan tindak pidana (jenis perbuatan, apakah turut serta, percobaan kejahatan, pembantu kejahatan, alasan lain diperberatnya pidana)
6. Motif pelaku melakukan tindak pidana.

Pertimbangan hakim dalam putusan yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu unsur “setiap orang”. Bahwa Pengertian “setiap orang” dalam ketentuan UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan tersebut memiliki pengertian yang bersifat khusus (specialis) yang berbeda dengan pengertian “setiap orang” pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pada Pasal 1 angka 21 UU RI No. 18 Tahun 2018 berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”. Dalam hal ini Terdakwa melakukan penebangan hutan tidak melibatkan orang lain secara terstruktur melainkan dilakukan secara tradisional dan bukan untuk tujuan komersial. Maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan terorganisasi bahkan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang dikecualikan dalam pengertian “terorganisasi” tersebut.

Dalam memberikan pertimbangan, Majelis Hakim melihat tujuan dibentuknya UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setelah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan telah

melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan, namun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terorganisasi, sehingga tidak memenuhi kualifikasi pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sementara pada putusan yang kedua, semua unsur yang dari Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 11 Ayat (4) yang berbunyi “*Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang*”. Penggunaan Pasal ini sebagai pertimbangan dalam putusan Bongku dapat dinilai sebagai satu kekeliruan, karena tidak ada kaitan antara tindakan yang didakwakan kepada Bongku dengan norma yang diatur dalam pasal tersebut. Majelis Hakim hanya melihat secara parsial dan tidak menelaah lebih dalam mengenai latar belakang dibentuknya undang-undang ini.

B. Faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls

1. Disparitas Pidana yang Bersumber dari Hakim

Hakim dalam fungsinya yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku dapat menimbulkan disparitas pidana dan penjatuhan pidana yang tidak proporsional. Majelis Hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan tersebut berdasarkan UUD tahun 1945, pada bab IX pasal 24. Pasal 24 :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Penafsiran Hukum oleh Hakim

Adanya perbedaan karakteristik penafsiran hakim akan sangat menentukan kualitas putusannya, maka menurut Arief Sidarta secara hermeneutika semua metode interpretasi perlu dikerahkan. Untuk menetapkan makna hukum yang tercantum dalam aturan perundang-undangan, dilakukan berdasarkan aturan positif yang dipahami (diinterpretasi) berdasarkan makna kata dan struktur kalimatnya (gramatikal) dalam konteks latar belakang sejarah (historikal), dalam kaitan dengan tujuannya (teologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut serta dalam konteks hubungan aturan-aturan positif yang lainnya (sistematis), dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dan ekonomikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan. Ini merupakan pendekatan hermeneutikal.

Pemahaman rumusan undang-undang secara parsial akan menimbulkan multi interpretasi. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dari kedua putusan yang dibahas dalam penelitian ini. Majelis Hakim pada putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls menyoroti Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjelaskan bahwa “*Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Pasal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls untuk memenuhi unsur subjek dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Sementara Majelis Hakim pada putusan Nomor 10 /Pid.Sus/2018/PN. Wns dalam membuktikan pemenuhan unsur subjek dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mempertimbangkan konsideran pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan dasar dan tujuan pembuatan undang-undang tersebut pada huruf f dinyatakan “*Bahwa peraturan perundang-*

undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi”, maka hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi.

3. Keterangan Saksi Ahli

Sebelum menjatuhkan putusan dalam persidangan, pembuktian menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui bersalah atau tidaknya seseorang atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya. Adanya perbedaan bidang keahlian serta pandangan dari saksi ahli yang memberikan keterangan tentu akan memberikan pengaruh pertimbangan dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Keterangan saksi ahli pidana pada perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns yang menyatakan Pasal 12 huruf b dan huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan huruf c dan Pasal 17 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 92 Ayat (1) huruf a UU P3H, sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dilihat secara filosofis atau prinsip dasar dari UU P3H secara utuh. Dan prinsip tersebut dapat dilihat pada pasal 1 yang memuat tentang Ketentuan Umum berisi asas-asas dari UU P3H. Sehingga jika mau melihat unsur-unsur dari pasal tersebut di atas, maka harus terlebih dahulu melihat asas-asasnya dalam Pasal 1, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, 4, 6 dan 21 maka terlihat bahwa Pasal 1 angka 6 mengandung imunitas bagi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial, dan bahwa UU P3H dibuat untuk memberantas kejahatan korporasi atau kejahatan yang terorganisir”. Keterangan ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Sementara pada perkara Nomor 89/Pid.B/L H/2020/PN.Bls saksi ahli hanya memberikan penjelasan secara umum mengenai pembentukan UU P3H ini.

4. Kekacauan Definisi Atau Ketidaktepatan Perumusan Suatu Pengertian Hukum

Kekacauan definisi atau ketidaktepatan perumusan suatu pengertian hukum menimbulkan multi interpretasi. Kaplan yang menyatakan bahwa salah satu pendukung utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding (disebut sebagai disparitas pidana) adalah kacaunya peraturan pemidanaan dalam KUHP.²⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat yang telah hidup secara turun temurun di dalam wilayah hutan tersebut dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya.²⁹ Namun dalam perumusannya, terdapat Pasal yang dinilai tidak adanya kejelasan mengenai pengecualian pemanfaatan hasil hutan terhadap masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11 ayat (4), Sehingga yang menjadi permasalahan adalah ketika masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan bergantung hidup pada hasil hutan harus meminta izin kepada pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan dengan batasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Hak tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait diabaikannya hak yang dimiliki masyarakat adat ataupun masyarakat yang tinggal di kawasan hutan yang mendapat pengecualian dan imunitas dalam undang-undang ini.

²⁸ Zarof Ricar, *Op.Cit*, hlm. 243

²⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Masalah yang selalu muncul dan selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana adalah mengenai putusan-putusan hakim yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara. Kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns dan Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN. Bls yaitu : disparitas pidana yang bersumber dari hakim, penafsiran hukum oleh hakim, perbedaan keterangan saksi ahli dan kekacauan definisi atau ketidakjelasan perumusan suatu pengertian hukum menimbulkan multi interpretasi.

B. Saran

1. Perlunya konsistensi terhadap pasal-pasal dalam UUP3H mengenai pengecualian tindak pidana kepada masyarakat yang secara turun temurun hidup di dalam hutan karena memanfaatkan sumber daya hutan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk tujuan komersial, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi.
2. Untuk menghindari adanya disparitas pidana dalam hal ini putusan yang tidak proporsional pada kasus yang serupa adalah pentingnya memahami hakikat hukum itu sendiri. Sebagaimana kasus yang telah diteliti ini salah satu penyebab adanya perbedaan yakni karena adanya perbedaan paradigma dalam memandang hakikat hukum itu sendiri sehingga keadilan yang dicita-citakan tidak tercapai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harusnya tidak dimaknai secara parsial yang berimplikasi rentannya masyarakat yang

hidup di sekitar kawasan hutan dijerat pada UU ini. Paradigma yang dianut serta metode penafsiran yang diterapkan akan mempengaruhi kualitas putusan hakim. Untuk itu, hakim perlu mempertimbangkan segala aspek dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Yasmil dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Ardiansyah, Irfan, 2017, *Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, KENCANA, Depok.
- Handayani, Tri Astuti. 2018, *Hukum Acara Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Isharyanto dan Aryoko Abdurrahman, 2016, *Penafsiran Hukum Hakim*, Moeka Publishing, Jakarta.
- Mappiase, Syarif. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, KENCANA, Jakarta.
- Ricar, Zarof. 2012, *Disparitas Pidana Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung
- Said, Yasir dan Ifrani. 2022, *Pidana Kehutanan Indonesia : Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd.Asis, 2017. *Hukum Acara Pidana*, KENCANA, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, 2018, Rajawali Pers, Depok.

B. Jurnal

- Amrun, "Faktor-Faktor Penyebab Timbunya Disparitas Pidana", Jurnal

MENARA *Ilmu*, Volume XII Jilid II
No.79 Januari 2018

Cut Anggiya Fitri, 2018, “Disparitas Putusan Pidana Tambahan Terhadap Perampasan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Dalam Tindak Pidana Kehutanan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2 (4) November.

Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No.3 Juli.

Wahyu Nugroho, “Disparitas Huku-man Dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Wns

Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls